

IMPLEMENTATION OF TRAFFIC RULES FOR PEDESTRIANS IN BANDAR LAMPUNG CITY

IMPLEMENTASI TENTANG TATA CARA BERLALU LINTAS BAGI PEJALAN KAKI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Bawoni Rizki^{1*}, Agustina Nurhayati², Erik Rahman Gumiri³

**Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

**bawonirizki@gmail.com*

Volume 4, Number 2, September 2025

Received: May 22, 2025 Accepted: May 22, 2025 Online Published: September 30, 2025.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of pedestrian traffic rules in Bandar Lampung City as regulated in Article 63 paragraph (1) of Local Regulation No. 10/2017 concerning Transportation. The focus lies on the use of pelican crossings, a pedestrian facility with traffic lights designed to enhance safety and comfort. However, public unfamiliarity and limited enforcement have hindered its effectiveness. Using the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, this research examines how local government policies align with the principle of public benefit (*maslahah 'ammah*), deliberation (*shura*), and obedience to authority (*ulil amri*). A qualitative field research design was applied, involving observations, interviews with the Department of Transportation officials and pedestrians, and document analysis. The findings reveal that although pelican crossings were initially installed, their operation and socialization have been inadequate, leading to low public awareness and poor compliance. The analysis shows that the lack of government efforts in education and enforcement contributes to the ineffective implementation of the regulation. This study contributes by linking legal implementation with Islamic political jurisprudence, offering insights into the integration of sharia principles in local governance. Practically, the research recommends enhanced socialization, accessible facility design, and inter-agency coordination to improve pedestrian safety.

Keywords : Fiqh Siyasah Tanfidziyyah; Local Regulation; Pedestrian Traffic; Pelican Crossing.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi tata cara berlalu lintas bagi pejalan kaki di Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi. Fokus kajian terletak pada penggunaan pelican crossing, yaitu fasilitas penyeberangan dengan lampu lalu lintas yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Namun, kurangnya sosialisasi dan minimnya kesadaran masyarakat menyebabkan fasilitas ini belum berjalan optimal. Dengan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (masalah 'ammah), musyawarah (shura), serta ketaatan kepada ulil amri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui observasi, wawancara terhadap pejabat Dinas Perhubungan dan pejalan kaki, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelican crossing pernah dipasang di beberapa titik, pemanfaatannya rendah karena kurangnya pengenalan dari pemerintah dan rendahnya kedisiplinan pengguna jalan. Analisis menemukan bahwa lemahnya upaya pemerintah dalam edukasi dan penegakan aturan berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan perda. Penelitian ini berkontribusi dengan menghubungkan implementasi hukum daerah dan perspektif fikih siyasah, serta memberikan rekomendasi praktis berupa peningkatan sosialisasi, desain fasilitas yang lebih ramah pengguna, dan koordinasi lintas lembaga demi meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

Kata Kunci : Siyasah Tanfidziyyah; Implementasi Perda; Lalu Lintas Pejalan Kaki; Pelican Crossing.